

PENGARUH *HUMAN CAPITAL*, *ECONOMIC FREEDOM*, DAN *CAPITAL FORMATION* TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI NEGARA-NEGARA OKI

Syanisma Khansa Indirwan

Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Email: syanisma.khansa.indirwan-2024@feb.unair.ac.id

Arva Athallah Susanto

Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Email: arva.athallah.susanto-2023@feb.unair.ac.id

Sri Herianingrum

Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Email: sri.herianingrum@feb.unair.ac.id

Tika Widiastuti

Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Email: tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

Anidah Binti Robani

Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Email: anidah@utem.edu.my

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal manusia, kebebasan ekonomi, dan pembentukan modal terhadap pembangunan ekonomi Islam di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari sembilan negara OKI selama periode 2002–2023, studi ini memanfaatkan model regresi panel multimetodologi, termasuk *Pooled OLS*, *Fixed Effect*, *Random Effect*, *PCSE*, dan *System GMM*. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) digunakan sebagai proksi pembangunan ekonomi Islam, sedangkan variabel bebas mencakup dimensi *human capital* (MYS dan LE), kebebasan ekonomi (LABF, MONF, TRAF, INVF, FINF), dan pembentukan modal (GCF). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *life expectancy*, *gross capital formation*, *monetary freedom*, dan *financial freedom* secara konsisten berpengaruh positif signifikan terhadap HDI dalam sebagian besar model, sedangkan variabel seperti *Trade Freedom*, *Investment Freedom*, dan *Mean Years of Schooling* menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten atau tidak signifikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan investasi manusia, stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di dunia Islam. Implikasi kebijakan dari temuan ini mendorong penguatan sektor kesehatan, pendidikan bernilai spiritual, serta tata kelola keuangan syariah yang inklusif dalam rangka mengakselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di negara-negara OKI.

Kata Kunci: modal manusia, kebebasan ekonomi, pembentukan modal, pembangunan ekonomi Islam, negara OKI.

Abstract

This study aims to analyze the influence of human capital, economic freedom, and capital formation on Islamic economic development in the member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Using a quantitative approach with panel data from nine OIC countries over the period 2002–2023, the study employs a multi-method panel regression model, including Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect, PCSE, and System GMM. The Human Development Index (HDI) is used as a proxy for Islamic economic development, while the

independent variables include dimensions of human capital (MYS and LE), economic freedom (LABF, MONF, TRAF, INVF, FINF), and capital formation (GCF). The analysis results show that variables such as Life expectancy, Gross capital formation, Monetary freedom, and Financial freedom consistently have a significant positive effect on HDI in most models, while variables such as Trade Freedom, Investment Freedom, and Mean Years of Schooling show inconsistent or insignificant effects. This study highlights the importance of synergy between human investment policies, macroeconomic stability, and the Islamic financial system in fostering sustainable and socially just economic growth in the Islamic world. The policy implications of these findings encourage strengthening the health sector, spiritually oriented education, and inclusive Islamic financial governance to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in OIC countries.

Keywords: Human capital, economic freedom, capital formation, Islamic economic development, OIC countries.

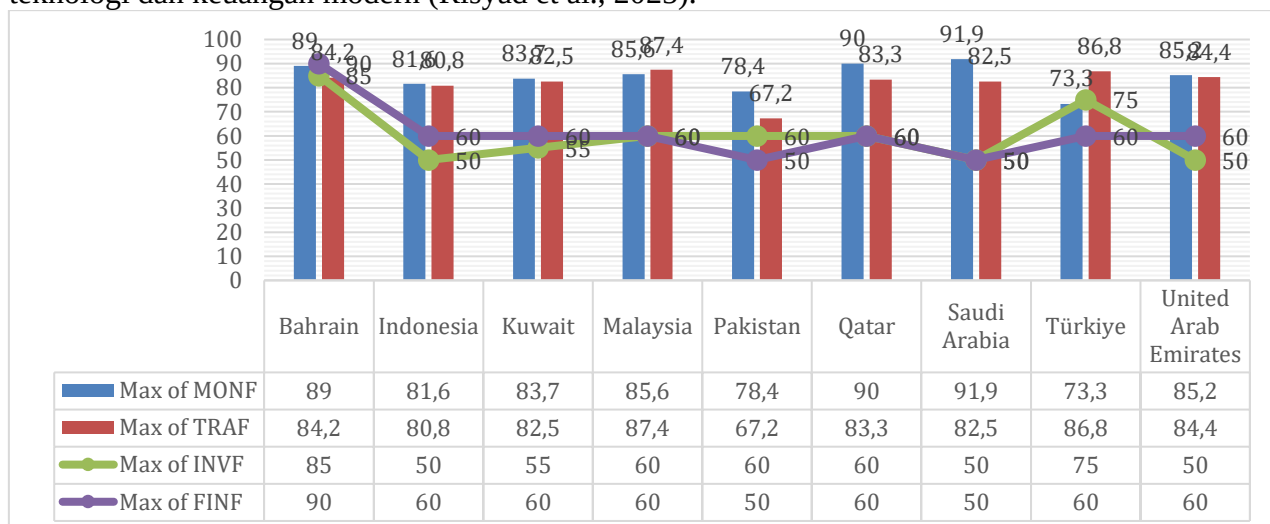
1. Pendahuluan

Dalam paradigma pembangunan ekonomi Islam, modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu pilar utama yang tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membentuk struktur sosial dan keuangan yang lebih adil. Pembangunan modal manusia meliputi investasi pada pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta nilai-nilai spiritual, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Herianingrum et al. (2023) menegaskan bahwa peningkatan kualitas modal manusia di negara-negara OKI memiliki korelasi positif terhadap kinerja ekspor sektor halal, khususnya dalam konteks industri perikanan Indonesia ke negara-negara OKI. Hal ini disebabkan oleh sinergi antara kemampuan tenaga kerja yang terdidik, pemahaman akan pasar halal global, dan kesadaran terhadap sertifikasi halal sebagai nilai tambah dalam rantai pasok produk ekspor. Selain itu, Herianingrum et al. (2023) juga menunjukkan bahwa modal manusia dan GDP yang disesuaikan dengan proporsi Muslim (adjusted Muslim GDP) merupakan faktor signifikan dalam mendorong potensi ekspor makanan halal ke pasar OKI. Dengan pendekatan model gravitasi perdagangan, penelitian ini menegaskan bahwa *human capital* menjadi kekuatan intrinsik yang memungkinkan negara-negara OKI bersaing secara efektif di pasar global berbasis halal. Dalam pendekatan endogen terhadap pertumbuhan ekonomi Islam, modal manusia bukan hanya sekadar faktor produksi, melainkan juga instrumen dakwah dan perubahan sosial. Risyad et al. (2024) menyampaikan bahwa peningkatan *human capital* melalui sistem pendidikan Islam yang terintegrasi dengan pembiayaan syariah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan, khususnya di negara-negara dengan sistem keuangan Islam yang kuat.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), modal manusia (*human capital*) juga memegang peranan sentral sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tidak seperti pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada akumulasi kapital fisik semata, paradigma pembangunan Islam mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial ke dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu menghasilkan manusia yang produktif sekaligus beretika (Kabiru & Wan Ibrahim, 2023). Studi yang dilakukan oleh Risyad et al. (2025) menyimpulkan bahwa modal manusia memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, khususnya bila dikombinasikan dengan instrumen keuangan Islam seperti sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan mudharabah. Interaksi antara pengembangan modal manusia dan keuangan

Islam tidak hanya meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan

Meskipun begitu, banyak negara OKI masih tertinggal dalam aspek pengembangan modal manusia. Laporan SESRIC (2020) menyebutkan bahwa mayoritas negara OKI menunjukkan performa di bawah rata-rata global dalam indikator-indikator utama HDI. Rendahnya investasi pada pendidikan dan kesehatan menyebabkan lemahnya produktivitas tenaga kerja dan rendahnya kemampuan adaptasi terhadap inovasi teknologi dan keuangan modern (Risya et al., 2025).



Gambar 1.1 *Economic freedom* di 9 Negara OKI tahun 2002-2023

Sumber: Heritage Foundation 2002-2023 (data diolah)

Data dalam grafik menunjukkan bahwa tingkat kebebasan ekonomi di negara-negara OKI masih bervariasi dan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang optimal. Misalnya, negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi menempati posisi teratas dalam *Monetary freedom* (MONF) dengan nilai masing-masing 90 dan 91,9 serta *Trade Freedom* (TRAF) sebesar 90 dan 83,2. Hal ini mencerminkan lingkungan ekonomi makro yang relatif stabil dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Namun demikian, kebebasan ekonomi yang tinggi ini belum cukup untuk mendorong capaian Human Development Index (HDI) secara merata, karena belum diiringi dengan peningkatan signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Lebih lanjut, indikator *Investment Freedom* (INVF) dan *Financial freedom* (FINF) yang mencerminkan kemudahan investasi dan inklusi keuangan juga menunjukkan ketimpangan. Negara seperti Pakistan hanya mencatat nilai INVF sebesar 40, meskipun nilai TRAF dan MONF-nya cukup tinggi, yang menunjukkan keterbatasan dalam penetrasi investasi asing atau domestik ke sektor-sektor produktif, termasuk pendidikan dan kesehatan. Indonesia dan Malaysia, meskipun memiliki nilai TRAF dan MONF di atas 80, tetap mencatat nilai INVF dan FINF yang stagnan di angka 50–60, yang mencerminkan masih adanya hambatan regulatif dan struktural dalam meningkatkan peran sektor keuangan terhadap ekonomi rakyat.

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kebebasan ekonomi saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan inklusif tanpa adanya investasi yang berpihak pada pembangunan manusia. Laporan SESRIC (2020) menegaskan bahwa mayoritas negara OKI masih tertinggal dalam indikator HDI karena rendahnya akses terhadap layanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, kebebasan

ekonomi yang tidak dibarengi dengan strategi pembangunan sosial yang inklusif justru akan memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam di negara-negara OKI perlu diarahkan untuk menyeimbangkan antara kebebasan pasar dengan keadilan sosial, dengan menempatkan sektor keuangan Islam sebagai katalisator. Kombinasi antara peningkatan kebebasan ekonomi seperti TRAF, MONF, dan FINF, dengan intervensi strategis berbasis nilai-nilai Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk sosial, diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan dan mempercepat peningkatan kualitas SDM di negara-negara OKI menuju pencapaian SDGs.

Ketimpangan ini dapat diperparah oleh ketergantungan negara-negara OKI terhadap sumber daya alam, sebagaimana ditegaskan oleh Saeed (2021), yang menyatakan bahwa negara-negara kaya sumber daya, khususnya di kawasan MENA, mengalami apa yang disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (natural resource curse), yaitu pertumbuhan ekonomi yang stagnan akibat dominasi sektor ekstraktif yang minim kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan modal manusia. Dalam konteks kebebasan ekonomi, penguatan institusi pendidikan dan pasar kerja berbasis syariah menjadi sangat penting. Modal manusia yang unggul akan mampu memanfaatkan kebebasan ekonomi secara produktif dan etis, menciptakan inovasi dalam sektor-sektor halal, seperti industri kreatif berbasis syariah, keuangan mikro syariah, dan pertanian halal.

Sebagai implikasi kebijakan, pembangunan ekonomi Islam di negara OKI memerlukan sinergi antara penguatan institusi pendidikan, reformasi pasar tenaga kerja syariah, serta inovasi pada instrumen pembiayaan Islam. Kebijakan fiskal dan moneter juga harus diarahkan untuk memberikan insentif pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan modal manusia, seperti insentif zakat untuk pendidikan dan pelatihan kerja. Lebih jauh, kebebasan ekonomi dan pembentukan modal fisik juga memegang peran penting dalam mendukung efek dari modal manusia. Dalam kerangka Islam, kebebasan ekonomi diterjemahkan sebagai kebebasan berusaha dalam koridor syariah, di mana manusia diberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi namun tetap dalam batas nilai-nilai moral dan etika. Investasi pada infrastruktur, teknologi produksi halal, serta integrasi modal sosial keuangan Islam seperti zakat produktif dan waqf tunai menjadi bentuk nyata pembentukan modal dalam sistem ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam di negara-negara OKI membutuhkan perhatian yang besar terhadap kualitas modal manusia. Negara-negara yang mampu mendorong pendidikan berbasis nilai Islam, memperluas akses ke layanan dasar, serta memperkuat kapasitas sumber daya insani dalam sektor-sektor ekonomi halal, akan memiliki daya saing lebih kuat di pasar global. Investasi jangka panjang pada *human capital* merupakan strategi fundamental dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam kajian pembangunan ekonomi Islam di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan mengintegrasikan *human capital*, *economic freedom*, dan *capital formation* dalam satu kerangka empiris yang komprehensif. Studi-studi sebelumnya cenderung menganalisis *human capital* sebagai determinan tunggal atau dominan dalam pembangunan ekonomi dan keuangan Islam, baik dari perspektif historis, pendidikan Islam, maupun kualitas sumber daya manusia, dengan temuan yang umumnya menunjukkan hubungan positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Sadr, 2015; Kuandyk et al., 2022; Rakhimzhanova et al., 2024). Di sisi lain, kajian mengenai *economic freedom* dan kualitas institusi lebih sering ditempatkan dalam konteks pertumbuhan ekonomi konvensional

atau pembangunan makro secara umum, tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan kerangka pembangunan ekonomi Islam (Slesman et al., 2015).

Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini mengombinasikan ketiga variabel utama tersebut untuk menjelaskan dinamika pembangunan ekonomi Islam secara lebih utuh, dengan menempatkan *economic freedom* sebagai mekanisme institusional yang memoderasi efektivitas *human capital* dan *capital formation* dalam mendorong pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini memperluas literatur dengan mengaitkan pembangunan ekonomi Islam tidak hanya pada akumulasi modal fisik, tetapi juga pada kualitas kebebasan ekonomi dan pengembangan manusia sebagai prasyarat terciptanya sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, melengkapi temuan-temuan sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek pendidikan, institusi, atau keuangan Islam secara parsial (Beik et al., 2021; Kamalu & Wan Ibrahim, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru baik secara teoretis maupun empiris dalam menjelaskan bagaimana interaksi antara *human capital*, *economic freedom*, dan *capital formation* membentuk jalur pembangunan ekonomi Islam di negara-negara OKI, serta memperkaya diskursus kebijakan pembangunan Islam di tingkat global (Mawardi et al., 2024).

2. Kajian Literatur

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Literatur ekonomi Islam menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam bersifat komprehensif, mencakup dimensi moral dan sosial, di samping material dan spiritual. Para ekonom Islam seperti M. Umer Chapra mengartikan tujuan akhir pembangunan bukan sekadar pertumbuhan GDP, tetapi tercapainya *falah* – kesejahteraan dan kebahagiaan dunia-akhirat. Konsep *falah* ini direalisasikan melalui pemenuhan *maqashid syariah* (tujuan syariat) yang mencakup terpeliharanya agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-maal*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi Islam mengintegrasikan pencapaian kesejahteraan material dengan keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial. Pembangunan dianggap baik apabila pertumbuhan disertai dengan pemerataan; pertumbuhan ekonomi yang moderat tetap dipandang positif jika sejalan dengan distribusi yang adil. Sebaliknya, fokus semata pada pertumbuhan materiil tanpa nilai moral dikritik karena dapat menimbulkan kesenjangan dan masalah sosial. Dalam studi Ryandono et al. (2020), pembangunan ekonomi Islam juga dikaitkan erat dengan perlindungan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus menjunjung prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *maslahah* (kemanfaatan), di mana pengelolaan alam tidak hanya untuk kepentingan generasi kini tetapi juga menjamin hak generasi mendatang. Oleh karena itu, paradigma pembangunan berkelanjutan dalam Islam bertujuan menjaga keseimbangan ekologis melalui penggunaan sumber daya secara proporsional, serta memperhatikan keberlanjutan (Ryandono et al., 2020).

Dalam konteks *maqashid syariah*, pembangunan yang berorientasi *falah* harus mampu memelihara lima dimensi dasar tersebut tidak hanya dalam aspek manusia, tetapi juga lingkungan sebagai amanah. Ryandono et al. (2020) menegaskan bahwa kerusakan ekologis akibat pembangunan eksploitatif bertentangan dengan prinsip Islam karena melanggar *sunnatullah* dan menghambat terwujudnya *falah* sejati. Oleh karena itu, pembangunan yang Islami adalah pembangunan yang menjadikan lingkungan hidup,

keadilan antar-generasi, dan distribusi manfaat sebagai bagian dari tolok ukur keberhasilan ekonomi, bukan semata akumulasi kapital atau pertumbuhan statistik. Paradigma ini juga menuntut pemerintah dan pelaku ekonomi untuk menjalankan pembangunan dengan prinsip keadilan antargenerasi, yaitu mengelola kekayaan alam secara bijak demi menjamin kualitas hidup umat manusia secara berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip istikhlaf (kepemimpinan manusia di bumi), yang mengharuskan setiap kebijakan pembangunan berlandaskan tanggung jawab moral terhadap Allah SWT, manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, paradigma pembangunan ekonomi Islam bersifat holistik menggabungkan pertumbuhan, pemerataan, spiritualitas, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial menuju tercapainya hayyaton thayyibah (kehidupan yang baik) secara menyeluruh. Konsep ini membedakan ekonomi Islam dari paradigma kapitalis yang cenderung materialistik; Islam menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari kualitas manusia dan masyarakat, bukan hanya akumulasi kekayaan semata (Ryandono dan Hazami, 2016).

Modal Manusia dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, modal manusia (*human capital*) dipandang sebagai faktor kunci pembangunan. Islam menempatkan manusia (sebagai khalifah di bumi) sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga pemberdayaan kualitas manusia menjadi pusat perhatian. Bahkan dikatakan bahwa konsep pembangunan Islam bertolak dari pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi sebagai motor penggerak utama ekonomi. Pengembangan SDM di sini mencakup seluruh potensi manusia secara utuh: peningkatan pendidikan, keterampilan, kesehatan, etos kerja, serta kualitas spiritual-moral. Tujuannya adalah membentuk tenaga kerja yang produktif sekaligus berintegritas, sesuai prinsip Islam yang menekankan ilmu pengetahuan dan akhlak. Modal manusia yang unggul dianggap modal inti untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan. Secara teoritis, modal manusia meningkatkan produktivitas dan kapasitas inovasi perekonomian. Model pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan (yang terkandung dalam SDM) langsung meningkatkan output dan kemampuan teknologi suatu negara. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang sekaligus pemerataan kesejahteraan. Empirisnya, Ertimi et al. (2016) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan (sebagai proxy modal manusia) secara signifikan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi.

Dalam konteks negara-negara OKI, sayangnya tingkat modal manusia rata-rata masih relatif tertinggal. Indeks Modal Manusia versi World Economic Forum misalnya mencatat skor rata-rata negara OKI hanya 58.7, lebih rendah dibanding rata-rata negara berkembang non-OKI (65.3), apalagi negara maju (79.4). Hal ini mencerminkan masih perlunya investasi besar pada pendidikan dan pelatihan di banyak negara Muslim. Meskipun begitu, terdapat variasi internal: beberapa negara OKI tergolong berprestasi tinggi dalam pengembangan SDM seperti Kazakhstan, Malaysia, dan UAE dengan skor indeks ~70, sedangkan negara lain masih jauh tertinggal. Fakta ini sejalan dengan temuan Ali et al. (2021) yang menyebut bahwa modal manusia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan di negara OKI berpendapatan menengah-atas, namun pengaruhnya belum signifikan di OKI berpendapatan rendah.

Studi Nasreen et al. (2015) juga memperkuat pentingnya investasi modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mereka menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan kelembagaan yang kuat mendorong investasi, termasuk investasi dalam

modal manusia, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan produktivitas. Selain itu, Dianda et al. (2025) menegaskan bahwa kebebasan ekonomi secara signifikan meningkatkan akumulasi modal manusia di negara berkembang, terutama melalui perlindungan hak milik, sistem hukum yang dapat diprediksi, dan kemudahan akses kredit. Efeknya paling kuat terlihat di negara dengan tingkat modal manusia yang rendah, menunjukkan potensi intervensi kebijakan institusional untuk mempercepat pembangunan SDM. Penelitian Chani et al. (2012) di Pakistan mengkonfirmasi hubungan dua arah antara pembangunan ekonomi dan pembentukan modal manusia, membuktikan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan SDM jangka panjang yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Duan et al. (2022) menemukan bahwa hubungan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi di negara BRICS bersifat non-linear (inverted U-shaped). Artinya, investasi SDM akan efektif hanya jika diimbangi dengan tata kelola yang baik dan kebebasan ekonomi. Ini menjadi penting bagi negara-negara OKI yang berambisi mengoptimalkan potensi demografi mereka melalui SDM berkualitas. Akhirnya, Shivkumar et al. (2023) menegaskan melalui pendekatan machine learning bahwa kebebasan ekonomi memiliki hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika digabungkan dengan modal manusia dan pembentukan modal fisik. Ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi Islam modern harus memperkuat kebijakan pasar bebas yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam.

Human Capital Formation

Human capital formation atau pembentukan modal manusia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi modern, termasuk dalam kerangka ekonomi Islam. Modal manusia merujuk pada akumulasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kapabilitas individu yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta proses pembelajaran berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, modal manusia tidak hanya dipahami sebagai faktor produksi semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikembangkan untuk mencapai kemaslahatan (*falah*) dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kualitas manusia memiliki posisi strategis dalam mendukung kinerja sektor keuangan Islam dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Literatur empiris terbaru menunjukkan bahwa modal manusia memiliki peran signifikan dalam mendorong kinerja keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis Islam. Risyad et al. (2025) menemukan bahwa interaksi antara keuangan Islam dan human capital secara signifikan meningkatkan pembangunan ekonomi, terutama melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan inklusivitas ekonomi. Studi ini menegaskan bahwa pengembangan modal manusia menjadi prasyarat penting agar instrumen keuangan Islam dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas sumber daya manusia menentukan efektivitas penyaluran pembiayaan syariah serta daya serap sektor riil di negara-negara Muslim.

Dalam konteks perbankan syariah, kajian literatur sistematis yang dilakukan oleh Zafar dan Jafar (2024) menunjukkan bahwa human capital merupakan determinan utama kinerja bank Islam, baik dari sisi profitabilitas, efisiensi, maupun stabilitas keuangan. Melalui telaah terhadap berbagai studi empiris, mereka menyimpulkan bahwa investasi pada pendidikan, pelatihan karyawan, dan pengembangan kompetensi manajerial secara

konsisten berkorelasi positif dengan kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa keunggulan kompetitif bank Islam tidak hanya bergantung pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada kualitas modal manusia yang mengelola dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Lebih lanjut, Zafar (2024) melalui pendekatan meta-analisis memperkuat bukti empiris mengenai hubungan positif antara human capital dan kinerja keuangan bank syariah. Dengan mengompilasi hasil dari berbagai penelitian lintas negara, studi ini menunjukkan bahwa pengaruh human capital bersifat robust dan konsisten, meskipun kekuatan pengaruhnya bervariasi tergantung pada konteks institusional dan tingkat perkembangan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan modal manusia merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi keberlanjutan industri perbankan Islam, khususnya di negara-negara dengan kualitas institusi yang masih berkembang.

Selain fokus pada human capital secara individual, literatur terbaru juga menyoroti pentingnya pembentukan intellectual capital secara lebih luas, termasuk structural capital dan knowledge economy. Akkas dan Asutay (2023) menunjukkan bahwa pembentukan intellectual capital, yang mencakup human capital dan sistem organisasi berbasis pengetahuan, berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah dan konvensional di negara-negara GCC. Namun, mereka menemukan bahwa bank syariah masih relatif tertinggal dalam memanfaatkan structural capital secara optimal, meskipun secara normatif Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pembelajaran institusional. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan praktik kelembagaan dalam pengelolaan modal manusia dan pengetahuan. Dalam skala makro, peran human capital juga berkaitan erat dengan isu ketimpangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Mawardi dan Risyad (2025) menegaskan bahwa pendidikan dan teknologi, sebagai komponen utama modal manusia, memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi ketika dikombinasikan dengan sistem keuangan Islam yang inklusif. Studi ini menunjukkan bahwa pengembangan modal manusia tidak hanya berdampak pada kinerja institusi keuangan, tetapi juga pada kualitas pembangunan ekonomi Islam secara agregat, khususnya dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.

Kebebasan Ekonomi dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam

Kebebasan ekonomi merujuk pada tingkat leluasa individu dan pelaku usaha dalam berproduksi, berdagang, mengonsumsi, serta memiliki properti tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah, sepanjang hak-hak properti dan hukum terjamin. Indeks Kebebasan Ekonomi (*Economic freedom Index*) menunjukkan adanya korelasi positif antara tingginya kebebasan ekonomi dengan berbagai capaian ekonomi dan sosial yang positif (IsDB, 2024). Dalam masyarakat yang ekonominya lebih bebas, pemerintah memberikan ruang bagi tenaga kerja, modal, barang dan jasa untuk bergerak bebas, serta menahan diri dari pembatasan yang tidak perlu terhadap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti perlindungan hak milik, kebebasan berdagang, kemudahan investasi, dan minimnya distorsi pasar merupakan komponen kunci kebebasan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan nilai Islam yang mendorong hurriyah (kebebasan) dan ‘adl (keadilan) dalam muamalah: Islam menghargai kebebasan berusaha dan perdagangan selama tidak melanggar rambu syariah (misalnya riba, penipuan, monopoli zalim) dan menjunjung keadilan kontrak. Dengan demikian, secara normatif tidak ada pertentangan antara kebebasan ekonomi yang sehat dan prinsip ekonomi Islam – keduanya sama-sama menuntut kepastian hukum, keterbukaan, dan ketiadaan kezaliman dalam transaksi.

Namun secara empiris, banyak negara OKI menghadapi tantangan institusional yang membuat skor kebebasan ekonomi mereka relatif rendah. Rata-rata skor indeks kebebasan ekonomi negara OKI sekitar 55 (skala 0–100), di bawah rata-rata global yang sekitar 60. Ini mencerminkan masih maraknya hambatan struktural seperti birokrasi berbelit, regulasi yang tidak efisien, korupsi, hingga keterbatasan penegakan hukum di sejumlah negara Muslim. Sub-indikator Trade Freedom dan Investment Freedom di kelompok OKI juga tercatat lebih rendah dari rata-rata dunia (skor perdagangan bebas rata-rata OKI 66.6 vs global 69; investasi bebas OKI 51.6 vs global 57). Di tingkat regional, negara-negara Afrika OKI mencatat skor terendah, sedangkan beberapa negara Arab Teluk relatif lebih baik dalam kebebasan perdagangan. Ertimi et al. (2016) menemukan bahwa faktor institusional seperti korupsi yang tinggi indikator dari rendahnya kebebasan ekonomi berdampak negatif signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara-negara OKI. Ini menegaskan pentingnya iklim ekonomi yang bebas dan bersih bagi pembangunan. Dalam kerangka ekonomi Islam, membangun institusi yang baik (*good governance*) merupakan bagian dari amanah, sehingga reformasi menuju kebebasan ekonomi yang terarah (deregulasi yang memacu usaha kecil, pemberantasan korupsi, perlindungan investor) sejalan dengan tujuan syariah untuk kemakmuran umat. Berbagai penelitian sepakat bahwa meningkatkan kebebasan ekonomi akan mendorong investasi, efisiensi alokasi sumber daya, dan inovasi, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan jangka panjang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain data panel yang menggabungkan data lintas negara (cross-section) dan deret waktu (time series). Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan antarvariabel secara objektif, terukur, dan replikatif. Jenis data yang digunakan adalah panel data dengan format tahunan, yang mengamati beberapa negara OKI secara simultan dalam rentang waktu 2002-2023. Negara-negara yang termasuk dalam sampel dipilih berdasarkan ketersediaan data yang lengkap dan konsisten untuk seluruh variabel penelitian diantaranya, Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turkiye, Bahrain, Kuwait, Pakistan. Adapun perangkat lunak yang digunakan olah data adalah STATA 17.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Proxy / Indikator	Sumber
IPM	HDI (<i>Human Development Index</i>)	UNDP
Modal Manusia	<i>Mean Years of Schooling</i> (MYS)	UNDP
	<i>Life expectancy</i> (LE)	UNDP
Kebebasan Ekonomi	<i>Labor Freedom</i> (LABF)	Heritage Foundation
	<i>Monetary freedom</i> (MONF)	Heritage Foundation
	<i>Trade Freedom</i> (TRAF)	Heritage Foundation
	<i>Investment Freedom</i> (INVF)	Heritage Foundation
	<i>Financial freedom</i> (FINF)	Heritage Foundation
Pembentukan Modal	<i>Gross capital formation</i> (GCF), % of GDP	World Bank (WDI)

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk dataset panel yang mencakup sembilan variabel utama, yang terdiri dari satu variabel dependen (HDI) dan delapan variabel independen (seperti MYS, LE, GCF, dan lima dimensi kebebasan ekonomi). Setiap variabel dijelaskan melalui proksi yang telah umum digunakan dalam studi-studi

pembangunan global, sehingga hasil penelitian ini dapat dibandingkan dan dikonfirmasi melalui literatur internasional yang telah ada.

Teknik Analisis Data

Langkah awal dalam analisis data mencakup pemeriksaan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik distribusi data pada setiap variabel. Ini meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum yang akan memberikan gambaran awal mengenai variabilitas data. Selain itu, korelasi antarvariabel juga dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas yang dapat mengganggu validitas estimasi, dilakukan uji Variance Inflation Factor (VIF). Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi parameter. Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil regresi akhir, namun juga memperhatikan validitas asumsi-asumsi dasar model regresi panel yang digunakan.

Pengujian Model dan Robustness Test

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan pengujian model dengan enam pendekatan regresi panel yang berbeda: Pooled Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects (FE), Random Effects (RE), Panel-Corrected Standard Errors (PCSE), dan System Generalized Method of Moments (S-GMM). Keberagaman metode ini dipilih sebagai bentuk uji ketahanan (robustness test) untuk membandingkan konsistensi hasil estimasi di bawah berbagai asumsi model dan struktur error yang berbeda. Pengujian dengan berbagai metode ini memberikan kekuatan argumentatif yang lebih kuat terhadap hasil penelitian.

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 MYS_{it} + \beta_2 LE_{it} + \beta_3 GCF_{it} + \beta_4 LAB_{it} + \beta_5 MON_{it} + \beta_6 TRAF_{it} + \beta_7 INVF_{it} + \beta_8 FIN_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

$$HDI_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^8 \beta_k X_{kit} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

$$HDI_{it} = \beta_1 MYS_{it} + \beta_2 LE_{it} + \dots + \beta_8 FIN_{it} + \mu_i + \epsilon_{it} \quad (3)$$

$$HDI_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^8 \beta_k X_{kit} + \epsilon_{it} \quad (4)$$

$$HDI_{it} = \alpha HDI_{it-1} + \beta_1 MYS_{it} + \beta_2 LE_{it} + \dots + \beta_8 FIN_{it} + \epsilon_{it} \quad (5)$$

Keterangan:

i = indeks negara

t = indeks waktu (tahun)

ϵ_{it} = error term idiosinkratik

Metode Fixed Effects (FE) digunakan untuk mengontrol heterogenitas tetap antarnegara yang tidak dapat diamati namun dianggap konstan sepanjang waktu, seperti budaya birokrasi atau sistem hukum. Sedangkan Random Effects (RE) digunakan saat variasi heterogenitas diasumsikan bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Pooled OLS berperan sebagai benchmark awal, meskipun metode ini tidak mengontrol perbedaan struktur antarunit, sehingga dapat memberikan estimasi bias jika asumsi heterogenitas diabaikan. Sementara itu, PCSE digunakan untuk mengatasi permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam data panel yang dapat menurunkan efisiensi estimator. Di sisi lain, System GMM dipilih karena mampu menangani dinamika variabel dependen melalui penggunaan variabel laten sebagai instrumen. GMM sangat ideal digunakan dalam studi pembangunan karena memperhitungkan adanya endogenitas dalam hubungan antara variabel independen dan

dependen, misalnya keterkaitan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan investasi atau pendidikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan merangkum karakteristik data secara kuantitatif melalui ukuran seperti rata-rata, median, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Tujuannya adalah memberikan pemahaman awal mengenai pola dan distribusi data sebelum analisis lebih lanjut. Rangkuman statistik deskriptif penelitian ini terdapat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
HDI	198	130.177	54.588	13	208
MYS	198	130.04	92.79	1	285
LE	198	177.131	88.768	4	299
GCF	198	26.036	7.244	12.835	48.869
LABF	198	58.015	40.859	1	132
MONF	198	76.096	39.884	1	146
TRAF	198	49.328	23.851	1	96
INVF	198	4.768	2.659	1	11
FINF	198	3.111	1.161	1	6

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Tabel menunjukkan bahwa HDI memiliki rata-rata sebesar 130,18 dengan nilai minimum 13 dan maksimum 208. Nilai standar deviasi sebesar 54,59 menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi antar observasi. Variabel MYS rata-ratanya 130,04 dengan sebaran yang lebih lebar (standar deviasi 92,79), mencerminkan perbedaan yang besar antar data, dengan rentang 1 hingga 285. Sementara itu, LE memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 177,13, dengan standar deviasi 88,77, minimum 4 dan maksimum 299, yang mengindikasikan variasi sangat tinggi.

Pada variabel ekonomi, GCF rata-ratanya 26,04 dengan standar deviasi 7,24, yang mencerminkan variasi sedang dengan nilai minimum 12,83 dan maksimum 48,87. LABF memiliki rata-rata 58,02 dan penyebaran cukup besar (std. dev. 40,86) dengan rentang 1 hingga 132. Begitu pula dengan MONF, rata-ratanya 76,10 dengan standar deviasi 39,88, minimum 1 dan maksimum 146. Variabel TRAF rata-ratanya 49,33 dengan penyebaran sedang (std. dev. 23,85), rentang antara 1 hingga 96. Sementara itu, variabel dengan rata-rata relatif rendah adalah INV (4,77) dan FIN (3,11). Keduanya memiliki deviasi standar yang kecil, masing-masing 2,66 dan 1,16, dengan rentang nilai yang sempit (1 hingga 11 untuk INV dan 1 hingga 6 untuk FIN), menunjukkan distribusi yang lebih stabil dibandingkan variabel lain.

Matriks Korelasi

Hasil matriks korelasi menunjukkan bahwa HDI memiliki hubungan paling kuat dengan LE (0,859*), serta korelasi sedang dengan TRAF, FIN, LABF, dan GCF. Hal ini menandakan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia erat kaitannya dengan usia harapan hidup, aktivitas perdagangan, inklusi keuangan, partisipasi tenaga kerja, dan pembentukan modal. Selain itu, LE juga berkorelasi positif dengan TRAF, LABF, dan FIN, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan harapan hidup sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan akses keuangan.

Tabel 4.2 Matriks Kolerasi

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) HDI	1.000								
(2) MYS	0.053	1.000							
(3) LE	0.859*	0.032	1.000						
(4) GCF	0.423*	0.070	0.326*	1.000					
(5) LABF	0.455*	-0.048	0.482*	0.073	1.000				
(6) MONF	0.255*	0.140*	0,09653	-0.001	0.035	1.000			
(7) TRAF	0.575*	-0.114	0.551*	0.400*	0.386*	0.034	1.000		
(8) INVf	0.266*	-0.086	0.241*	0,09167	-0.004	-0.054	0.378*	1.000	
(9) FINF	0.535*	0.014	0.441*	0.425*	0.211*	0,08056	0.517*	0.572*	1.000

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Di sisi lain, FINF menunjukkan korelasi cukup kuat dengan INVf dan TRAF, yang menegaskan peran penting inklusi keuangan dalam mendorong investasi dan perdagangan. Sementara itu, variabel MYS tampak memiliki korelasi lemah dengan sebagian besar variabel lain, sehingga kontribusinya relatif kecil dalam menjelaskan keterkaitan pembangunan manusia dengan faktor ekonomi. Secara umum, korelasi antarvariabel memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara pembangunan manusia, sektor ekonomi, dan akses keuangan.

Uji Multikolineritas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel berada pada kisaran 1,07 hingga 2,14 dengan rata-rata (mean VIF) sebesar 1,57. Nilai ini jauh di bawah ambang batas umum (10), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas serius dalam model. Dari tabel 4.3, variabel-variabel independen yang digunakan relatif bebas dari korelasi tinggi satu sama lain dan layak dimasukkan dalam analisis regresi lebih lanjut.

Tabel 4.3 Uji Multikolieritas

Variable	VIF	1/VIF
FINF	2.14	0.468152
TRAF	1.92	0.521603
LE	1.80	0.555022
INVf	1.70	0.587292
LABF	1.46	0.686451
GCF	1.41	0.707160
MONF	1.08	0.926813
MYS	1.07	0.938682
Mean VIF	1.57	

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Generalized Least Square

Hasil estimasi GLS menunjukkan bahwa LE, GCF, MONF, dan FINF berpengaruh positif signifikan terhadap HDI. Artinya, peningkatan harapan hidup, pembentukan modal, kebebasan moneter, serta kebebasan finansial menjadi faktor utama yang mendorong pembangunan manusia. Variabel LABF hanya signifikan pada taraf 10%, sedangkan MYS, TRAF, dan INVf tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, dimensi kesehatan, investasi fisik, dan kebebasan ekonomi tertentu terbukti lebih menentukan terhadap HDI dibandingkan variabel lain.

Tabel 4.4 Generalized Least Square

HDI	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95% conf. interval]
MYS	.0068129	.0192065	0.35	0.723	-.0308311 .0444569
LE	.4190635	.0261091	16.05	0.000	.3678905 .4702364
GCF	.9035531	.283454	3.19	0.001	.3479935 1.459.113
LABF	.0875878	.0510054	1.72	0.086	-.012381 .1875567
MONF	.1927366	.0449693	4.29	0.000	.1045983 .2808749
TRAF	.1376944	.1002363	1.37	0.170	-.0587652 .334154
INVF	.0696575	.8472038	0.08	0.934	-1.590.831 1.730.146
FINF	5.630.038	2.173.543	2.59	0.010	1.369.971 9.890.104
_cons	-12.851	8.141.988	-1.58	0.114	-28.809 3.107.006

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Robustness Test

Hasil uji robustness menunjukkan konsistensi pengaruh beberapa variabel kunci terhadap HDI. Variabel LE (*Life expectancy*) secara umum berpengaruh positif signifikan dalam hampir semua model (OLS, FE, RE, PCSE), kecuali pada estimasi System-GMM di mana koefisiennya negatif signifikan. Hal ini menandakan bahwa harapan hidup tetap menjadi determinan utama HDI, meskipun arah pengaruhnya bervariasi pada model dinamis. Demikian pula, GCF (Gross capital formation) konsisten signifikan positif pada sebagian besar model (OLS, RE, PCSE), meskipun dalam S-GMM hasilnya negatif signifikan. Variabel MONF (*Monetary freedom*) juga menunjukkan pengaruh positif signifikan pada OLS, RE, dan PCSE, tetapi menjadi negatif signifikan dalam model GMM.

Tabel 4.5 Robustness Test

	(OLS)	(FE)	(RE)	(PCSE)	(S-GMM)
MYS	0.00681 (0.0197)	-0.0381*** (0.0128)	0.00681 (0.0197)	0.00587 (0.0166)	0.00314 (0.0122)
LE	0.419*** (0.0267)	0.178*** (0.0256)	0.419*** (0.0267)	0.219*** (0.0322)	-0.225** (0.108)
GCF	0.904*** (0.290)	0.774** (0.307)	0.904*** (0.290)	1.209*** (0.264)	-0.779* (0.447)
LABF	0.0876* (0.0522)	-0.0194 (0.0350)	0.0876* (0.0522)	0.123** (0.0562)	-0.119 (0.0758)
MONF	0.193*** (0.0460)	-0.00401 (0.0382)	0.193*** (0.0460)	0.205*** (0.0504)	-0.161** (0.0722)
TRAF	0.138 (0.103)	-0.131* (0.0733)	0.138 (0.103)	0.260** (0.112)	-0.257 (0.218)
INVF	0.0697 (0.867)	3.708*** (0.654)	0.0697 (0.867)	0.0525 (0.900)	0.862 (4.078)
FINF	5.630** (2.225)	9.673*** (1.661)	5.630** (2.225)	6.482*** (1.998)	0 (.)
L.hdi_					1.824*** (0.431)
Constant	-12.85 (8.334)	43.67*** (9.480)	-12.85 (8.334)	3.018 (9.453)	-15.87 (24.08)
Observations	198	198	198	198	189

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Selanjutnya, FINF (Financial Freedom) menunjukkan pengaruh positif signifikan dalam OLS, FE, RE, dan PCSE, meskipun tidak terestimasi pada model GMM. Variabel LABF (Labor Force) berpengaruh positif signifikan dalam beberapa model (OLS, RE, PCSE), tetapi tidak signifikan dalam FE dan S-GMM. MYS (Mean Years of Schooling) dan TRAF (Trade Freedom) cenderung tidak konsisten, dengan hasil signifikan negatif hanya pada model FE. Sementara itu, INVFF (Investment Freedom) secara umum tidak signifikan, kecuali pada model FE di mana berpengaruh positif kuat. Penambahan variabel L.HDI dalam model dinamis S-GMM menunjukkan pengaruh positif signifikan, yang menegaskan adanya efek ketergantungan antarperiode pada pembangunan manusia. Secara keseluruhan, robustness test memperlihatkan bahwa variabel kesehatan (LE), pembentukan modal (GCF), serta kebebasan moneter dan keuangan (MONF, FINF) relatif konsisten sebagai faktor penting dalam meningkatkan HDI. Namun, hasil yang bervariasi antar model juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dinamika data panel agar interpretasi lebih komprehensif.

Statistik Goodness of Fit Model Regresi OLS

Hasil uji goodness of fit menunjukkan bahwa model regresi OLS memiliki R-squared sebesar 0,8019 dan Adjusted R-squared 0,7935, yang berarti model mampu menjelaskan sekitar 79% variasi variabel dependen. Nilai F-statistic = 95,63 dengan Prob. 0,0000 mengindikasikan model signifikan secara statistik, sementara Root MSE = 24,805 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi relatif rendah.

Tabel 4.6 Statistik Goodness of Fit Model Regresi OLS

Statistic	Value	Statistic	Value
R-squared	0.8019	Mean dependent var.	130.177
Adjusted R-squared	0.7935	S.D. dependent var.	54.588
Root MSE	24.805	Sum squared resid.	116290.415
F-statistic	F(8,189) = 95.63		
Prob. (F-statistic)	0.0000		

Sumber: Peneliti (data diolah) (2025)

Pengaruh Mean Years of Schooling (MYS) terhadap Human Development Indeks (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

Sebagai indikator utama dari modal manusia, variabel MYS menunjukkan pengaruh tidak signifikan dalam hampir seluruh model (OLS, RE, PCSE, dan S-GMM), kecuali dalam model Fixed Effect (FE) yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan pada level 1% (-0.0381 ***). Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks negara-negara OKI, lama sekolah belum menjamin peningkatan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh, kemungkinan akibat rendahnya kualitas pendidikan, mismatch antara kurikulum dan kebutuhan pasar, atau ketimpangan akses antarwilayah. Kebijakan yang efektif perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan distribusi kekayaan secara adil serta kesejahteraan sosial yang menyeluruh (Hachicha & Ben Amar, 2015). Perspektif ini menyoroti pergeseran paradigma menuju pemahaman pembangunan manusia sebagai proses holistik, yang menggabungkan pertimbangan etis dengan metrik pendidikan kuantitatif (Mustafa et al., 2016). Dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, hal ini menguatkan argumen bahwa pembangunan modal manusia bukan hanya kuantitatif, tetapi harus memperhatikan dimensi spiritual, moral, dan keterampilan produktif (amal shaleh), sesuai dengan prinsip al-tarbiyah al-insaniyah (pendidikan manusia seutuhnya). Investasi struktural dalam peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan jangkauan sangat penting untuk

menjembatani kesenjangan tersebut serta mendorong pembangunan manusia berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Puspitasari et al., 2023; Susanto, 2024).

Pengaruh *Life expectancy* (LE) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

Variabel LE menunjukkan pengaruh yang sangat konsisten dan signifikan positif dalam empat dari lima model (OLS, FE, RE, dan PCSE) dengan pengaruh tertinggi pada model OLS (0.419*). Namun, dalam model dinamis S-GMM, pengaruhnya menjadi negatif dan signifikan pada level 5% (-0.225^{**}). Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek dan lintas negara, peningkatan kesehatan masyarakat berdampak besar terhadap pembangunan manusia, tetapi dalam konteks waktu dan kontrol endogenitas, terdapat kemungkinan bahwa negara-negara dengan LE tinggi menghadapi tantangan baru seperti beban kesehatan jangka panjang atau stagnasi produktivitas. Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, kesehatan dipandang sebagai *maqashid syariah* utama, yakni *hifz al-nafs*, yang bertujuan melindungi jiwa dan kesehatan individu (Herianingrum et al., 2024; Huda et al., 2020). Oleh karena itu, peningkatan layanan kesehatan yang berkeadilan bukan hanya sekedar isu kebijakan publik, tetapi merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi di negara-negara anggota OKI (Medias et al., 2021). Ditekankan dalam kajian ini bahwa peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan harus disertai dengan pemanfaatan dana yang ada, termasuk dalam bentuk *waqf*, untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan benefit yang sama dalam akses kesehatan dan pendidikan (Hariri, 2023; Rifin et al., 2022). Dalam kerangka ekonomi Islam, kesehatan adalah *maqashid syariah* utama (*hifz al-nafs*) yang tidak hanya berdampak pada produktivitas tenaga kerja, tetapi juga kelangsungan ibadah dan kontribusi sosial umat. Oleh karena itu, peningkatan layanan kesehatan yang berkeadilan adalah pilar penting pembangunan ekonomi Islam di OKI.

Pengaruh Gross capital formation (GCF) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

GCF sebagai proksi dari pembentukan modal fisik menunjukkan pengaruh konsisten positif dan signifikan di semua model kecuali S-GMM. Dalam model PCSE, koefisiennya bahkan mencapai 1.209*. Namun dalam S-GMM, efeknya berubah menjadi negatif dan signifikan pada level 10% (-0.779^{**}), yang bisa mencerminkan *overinvestment* yang tidak efisien, atau *lagging effect* dari investasi terhadap kualitas pembangunan manusia. Dalam ekonomi Islam, pembentukan modal tidak hanya dipahami sebagai akumulasi aset, tetapi juga sebagai *wakaf produktif*, *sukuk infrastruktur*, atau *zakat investasi* yang harus berorientasi pada *maslahah* (kemaslahatan umum). Dalam konteks ekonomi Islam, pengertian GCF melampaui sekedar akumulasi aset fisik. GCF juga mencakup instrumen keuangan syariah seperti *wakaf produktif* dan *sukuk infrastruktur*, yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum dalam investasi (Đorđević et al., 2022). Implikasi ini menandakan bahwa efektivitas GCF tidak hanya terukur dari segi finansial, tetapi juga dari seberapa baik negara-negara OKI dapat mengintegrasikan investasi fisik dengan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Opadeji et al., 2023). Penelitian Aliman et al. menekankan bahwa keberhasilan investasi dalam pemenuhan kebutuhan sosial tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusi dalam pembangunan (Jolo & Koç, 2023). Oleh karena itu, efektivitas GCF terhadap pembangunan sangat tergantung pada bagaimana negara OKI menyelaraskan investasi fisik dengan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup umat.

Pengaruh Labor Freedom (LF) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

Variabel Labor Freedom menunjukkan pengaruh yang lemah dan tidak konsisten. Dalam model OLS dan RE, efeknya positif dan signifikan marjinal ($p < 0.1$), serta signifikan pada PCSE (0.123; $p < 0.05$), namun menjadi tidak signifikan dan bahkan negatif dalam FE dan S-GMM. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja di negara-negara OKI belum sepenuhnya berdampak positif terhadap pembangunan manusia, kemungkinan karena kualitas pekerjaan yang rendah, tingginya sektor informal, atau ketidaksesuaian antara kebijakan tenaga kerja dan kebutuhan produktivitas riil. Lebih jauh lagi, studi tentang dampak regulasi pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa regulasi yang lebih sedikit dapat menarik investasi asing, yang pada gilirannya meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Ahmed & Aljane, 2014; Bernal-Verdugo et al., 2012). Namun, ada pula argumen bahwa pasar kerja yang sangat fleksibel tanpa jaminan hak pekerja dapat meningkatkan ketidakadilan sosial, yang bertentangan dengan tujuan pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di negara-negara yang menganut nilai-nilai Islam (Alwi et al., 2017; Cammett & Posusney, 2010). Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara kebijakan tenaga kerja dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam, pasar tenaga kerja ideal adalah yang menjamin keadilan upah (ujrah), mencegah eksploitasi, dan menjamin kesejahteraan pekerja. Kebebasan yang tidak diiringi dengan prinsip adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan) berpotensi melahirkan ketimpangan, bukan peningkatan HDI.

Pengaruh Monetary freedom (MONF) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

Variabel MONF menunjukkan pengaruh yang konsisten positif dan signifikan dalam model OLS, RE, dan PCSE ($p < 0.01$), dengan koefisien tertinggi pada PCSE (0.205*). Namun, dalam model FE efeknya tidak signifikan, dan pada S-GMM, arah pengaruhnya menjadi negatif dan signifikan (-0.161 ; $p < 0.05$). Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga dan kebebasan moneter mendorong pembangunan manusia dalam jangka pendek atau lintas negara, tetapi jika tidak dikendalikan dengan baik secara struktural, bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Dalam kerangka ekonomi Islam, peran kebijakan moneter harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga stabilitas harga (la dharar wa la dhirar), serta menghindari praktik riba. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa kebebasan moneter tanpa landasan prinsip syariah dapat berakibat pada volatilitas yang merugikan, terutama bagi masyarakat yang paling rentan secara ekonomi (Mubarrok et al., 2022). Dengan demikian, penting untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kebebasan dalam pengaturan moneter, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika dan keadilan sosial yang menjadi inti dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam (Waluyo, 2021). Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan moneter harus menjaga kestabilan harga (la dharar wa la dhirar), menghindari riba, dan memastikan nilai riil mata uang stabil. Karena itu, kebebasan moneter tanpa prinsip syariah bisa menciptakan volatilitas yang mengancam ketahanan sosial-ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin.

Pengaruh Trade Freedom (TRAF) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

Kebebasan perdagangan memiliki pengaruh yang tidak konsisten di seluruh model. Dalam OLS dan RE, TRAF tidak signifikan, sementara pada FE, efeknya *negatif

signifikan pada level 10% (-0.131^{**}), dan pada PCSE efeknya positif signifikan (0.260 ; $p < 0.05$). Di sisi lain, dalam S-GMM efeknya kembali negatif dan tidak signifikan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, terutama di negara-negara OKI yang masih bergantung pada komoditas primer dan memiliki ketergantungan impor tinggi. Dalam ekonomi Islam, perdagangan yang bebas harus berlandaskan pada keadilan ('adl), keterbukaan (amanah), dan keberkahan (barakah). Tanpa perlindungan atas sektor UMKM, akses produksi lokal, dan distribusi adil, liberalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan, bukan meningkatkan HDI. Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan perdagangan yang adil dan berkelanjutan menjadi krusial untuk mencegah pelebaran kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, studi yang menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pengembangan manusia menegaskan pentingnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta distribusi yang adil agar efek positif dapat dihasilkan (Ecer & Zolfani, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Cagé & Gadenne, (2018) menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dapat berdampak pada pendapatan negara dan penerimaan pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan manusia. Penemuan ini merefleksikan bahwa tanpa adanya dukungan untuk sektor lokal dan perlindungan bagi UMKM, liberalisasi perdagangan dapat memperparah situasi, bukan memperbaiki HDI.

Pengaruh Investment Freedom (INVF) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

INVF menunjukkan pengaruh yang sangat tidak konsisten, bahkan dalam sebagian besar model (OLS, RE, PCSE, dan S-GMM) tidak signifikan sama sekali. Satu-satunya model yang menunjukkan signifikansi adalah Fixed Effect (FE), dengan koefisien positif sangat tinggi (3.708 ; $p < 0.01$). Hal ini mencerminkan bahwa dampak kebebasan investasi hanya terasa secara internal (within-country variation) dan tidak cukup kuat secara lintas negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, kebebasan investasi yang tidak disertai etika dan distribusi manfaat justru berpotensi menimbulkan eksploitasi aset umat, terutama jika dominasi asing dalam investasi tidak membawa transfer teknologi atau peningkatan SDM lokal. Prinsip syirkah (kemitraan) dan mudharabah dalam Islam menekankan bahwa investasi harus memberi keuntungan bersama, bukan hanya profit semata. Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam, penting untuk memahami bahwa kebebasan investasi yang dilakukan tanpa disertai oleh etika dan distribusi manfaat dapat berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap aset umat. Hal ini terutama berlaku jika investasi asing mendominasi, tanpa adanya transfer teknologi yang substansial atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal (Singh & Gál, 2020). Dalam kerangka investasi Syirkah dan Mudharabah, diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dari investasi tersebut memberikan keuntungan kepada semua pihak, bukan hanya keuntungan untuk investor semata (Zainur, 2021). Penelitian di bidang ini telah menemukan bahwa ekonomi yang didorong oleh kebebasan, bersama dengan pengelolaan yang baik dari institusi dan sumber daya, mampu memperkuat pertumbuhan manusia dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Graafland, 2019; Korle et al., 2020).

Pengaruh Financial freedom (FINF) terhadap Human Development Index (HDI) dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Islam

Variabel FINF menjadi salah satu variabel yang paling konsisten dan signifikan positif dalam hampir semua model statis: OLS, FE, RE, dan PCSE, dengan tingkat signifikansi minimal $p < 0.05$, dan bahkan $p < 0.01$ di model FE (koefisien 9.673).

Namun, dalam S-GMM, variabel ini tidak muncul (drop), kemungkinan karena dianggap eksogen atau kolinear. Signifikansi kuat dan koefisien tinggi menunjukkan bahwa kebebasan sektor keuangan dari kontrol pemerintah, termasuk efisiensi pasar modal dan perbankan, berperan besar dalam mendukung pembangunan manusia. Dalam ekonomi Islam, sistem keuangan yang bebas namun tetap berbasis syariah tanpa riba, maisir, dan gharar akan memberikan stabilitas dan inklusi finansial yang tinggi. Hal ini mendukung konsep tamkin (pemberdayaan) dan tawazun (keseimbangan) dalam pembangunan, di mana akses masyarakat terhadap pembiayaan halal turut meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Dalam konteks ekonomi Islam, peran FINF menjadi semakin relevan, terutama ketika mengaitkannya dengan kebijakan dan implementasi perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Daulay et al., 2023). Pembiayaan halal, yang mengutamakan peningkatan ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap HDI, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan layanan keuangan di kalangan masyarakat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan..

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Islam di negara-negara OKI secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas modal manusia (khususnya *life expectancy*), pembentukan modal fisik (GCF), serta dimensi kebebasan ekonomi tertentu seperti kebebasan moneter dan keuangan. Variabel *life expectancy* memiliki pengaruh paling stabil dan signifikan positif terhadap peningkatan HDI, menunjukkan pentingnya investasi pada sektor kesehatan dalam kerangka maqashid syariah. Pembentukan modal (GCF) juga menjadi determinan utama yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, selaras dengan prinsip Islam tentang produktivitas dan kemaslahatan. Di sisi lain, variabel seperti *mean years of schooling*, *investment freedom*, dan *trade freedom* menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan relevansi kebijakan sektor pendidikan dan investasi. Temuan ini menguatkan tesis bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak dapat bergantung pada liberalisasi pasar semata, melainkan harus ditopang oleh integrasi nilai-nilai keadilan sosial, etika Islam, dan pemberdayaan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis empiris dilakukan pada tingkat makro antarnegara, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika mikro institusional dan perbedaan kebijakan di masing-masing negara OKI. Kedua, pengukuran pembangunan ekonomi Islam masih bergantung pada indikator kuantitatif yang tersedia, yang berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan dimensi normatif dan sosial ekonomi Islam secara komprehensif. Ketiga, keterbatasan ketersediaan dan konsistensi data lintas negara juga membatasi kemampuan penelitian ini untuk mengeksplorasi efek jangka panjang secara lebih mendalam. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan mengombinasikan analisis makro dan mikro, misalnya melalui studi kasus institusi keuangan Islam atau analisis panel tingkat industri dan lembaga. Penelitian mendatang juga dapat memperluas pengukuran pembangunan ekonomi Islam dengan memasukkan indikator *maqāsid al-sharī'ah*, inklusi sosial, dan kualitas kelembagaan Islam guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik. Selain itu, eksplorasi peran variabel moderasi dan mediasi, seperti kualitas institusi, inovasi

teknologi, dan tata kelola syariah, diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme hubungan antara *human capital*, kebebasan ekonomi, dan pembangunan ekonomi Islam dalam konteks Negara OKI.

6. Referensi

- Ahmed, S., & Aljane, A. (2014). Labor Regulation and Unemployment: The Case of Tunisia. *International Journal of Economics and Business Administration*, II(Issue 4), 3–13. <https://doi.org/10.35808/ijeba/52>
- Akkas, E., & Asutay, M. (2023). The impact of intellectual capital formation and knowledge economy on banking performance: a case study of GCC's conventional and Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(5), 1149–1170. <https://doi.org/10.1108/JFRA-08-2021-0251>
- Alwi, E. A. Z. E., Anas, N., Taib, W. R. W., Razali, M. H., Rosli, H. M., Hassan, H. S. M., & Rahim, I. N. A. (2017). A Review of Islamic Aqeedah Compliance Index (IACI) From Malaysian Perspectives. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3583>
- Asmuni Mth. (2010). Konsep Membangun Ekonomi Islam. *Al-Mawarid*, 10(2), 1–24.
- Beik, I. S., Saoqi, A. A. Y., & Zaenal, M. H. (2021). A Critical Survey On Methodologies And Techniques Adopted In Teaching Islamic Economics And Finance Globally. In *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance* (pp. 5–16). Department of Islamic Economics, IPB University, Indonesia: Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003252764-3>
- Bernal-Verdugo, L. E., Furceri, D., & Guillaume, D. (2012). Labor Market Flexibility and Unemployment: New Empirical Evidence of Static and Dynamic Effects. *Comparative Economic Studies*, 54(2), 251–273. <https://doi.org/10.1057/ces.2012.3>
- Cagé, J., & Gadenne, L. (2018). Tax Revenues and the Fiscal Cost of Trade Liberalization, 1792–2006. *Explorations in Economic History*, 70, 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2018.07.004>
- Cammett, M., & Posusney, M. P. (2010). Labor Standards and Labor Market Flexibility in the Middle East: Free Trade and Freer Unions? *Studies in Comparative International Development*, 45(2), 250–279. <https://doi.org/10.1007/s12116-010-9062-z>
- Chani, M. I., Ul Hassan, M., & Shahid, M. (2012). *Human capital formation and economic development in Pakistan: An empirical analysis*. *Actual Problems of Economics*, 132(6), 486–495.
- Daulay, A. H., Asmuni, A., & Harahap, I. (2023). Investment, Islamic Human Development Index and Banking Financing on Economic Growth and Their Impact on Labor Absorption. *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(2), 339–346. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i2.12493>
- Dianda, I., Zidouemba, P. R., & Tou, D. (2025). Heterogeneous effects of *economic freedom* on *human capital* in developing countries. *Journal of Institutional Economics*, 21, 1–20. <https://doi.org/10.1017/S1744137425000141>
- Duan, C., Zhou, Y., Cai, Y., Gong, W., Zhao, C., & Ai, J. (2022). Investigate the impact of *human capital*, *economic freedom* and governance performance on the economic growth of the BRICS. *Journal of Enterprise Information Management*, 35(4–5), 1323–1347. <https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2021-0179>

- Ecer, F., & Zolfani, S. H. (2022). Evaluating *Economic freedom* via a Multi-Criteria Merec-Dnma Model-Based Composite System: Case of Opec Countries. *Technological and Economic Development of Economy*, 28(4), 1158–1181. <https://doi.org/10.3846/tede.2022.17152>
- Fuhairah, M. T. (2024). Opportunities for the Application of Zakat as a Deduction for Individual Taxable Income as an Alternative Fiscal Policy in Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 14(1), 82–96. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.82-96>
- Graafland, J. (2019). Contingencies in the Relationship Between *Economic freedom* and Human Development: The Role of Generalized Trust. *Journal of Institutional Economics*, 16(3), 271–286. <https://doi.org/10.1017/s1744137419000705>
- Hachicha, N., & Ben Amar, A. (2015). Does Islamic bank financing contribute to economic growth? The Malaysian case. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(3), 349–368. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2014-0063>
- Hadi Ryandono, M. N., & Hazami, B. (2016). Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>
- Hariri, M. (2023). Economic Potential of Waqf for Social Welfare: Patterns and Contrasts in Menap and Countries in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, 1–14. <https://doi.org/10.46281/ijswr.v4i1.2079>
- Hendratmi, A., Sukmaningrum, P. S., Ryandono, M. N. H., & Ratnasari, T. (2019). The Role of Islamic Crowdfunding Mechanisms in Business and Business Development. *GATR Journal of Business and Economics Review*, 4(1), 10–23. [https://doi.org/10.35609/jber.2019.4.1\(2\)](https://doi.org/10.35609/jber.2019.4.1(2))
- Herianingrum, S., Alan Nur, M., Rusgianto, S., Hapsari, M. I., Ergun, E., Firmansyah, F., & Febriyanti, A. R. (2024). Gravity model of trade approach: what drives Indonesia's seafood export and its halal market potency in OIC (Organization of Islamic Cooperation) countries. *Journal of Islamic Marketing*, 15(8), 2016–2035. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2023-0226>
- Herianingrum, S., Iswati, S., Ma'ruf, A., & Bahari, Z. (2024). The role of Islamic economics and social institutions during the time of Covid-19. *Journal of Islamic Marketing*, 15(8), 2144–2162. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2022-0134>
- Herianingrum, S., Muhammad Nafik, H., Fauzi, Q., Afifa, F. U., & Laila, N. (2019). The effect of government expenditure on islamic Human Development Index. *Opcion*, 35(88), 685–703.
- Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2020). Conceptualizing Waqf Insan on i-HDI (Islamic Human Development Index) Through Management Maqashid Syariah. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286206>
- Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) & Islamic Development Bank (IsDB). (2024). Annual Report on Investment Climate and Opportunities in OIC Countries. In ICDT & IsDB, Casablanca and Jeddah. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www./publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

- Jolo, A. M., & Koç, M. (2023). The Impact of *Capital formation* on Economic Diversification in GCC Countries—Empirical Analysis Based on the PVAR Model. *Sustainability (Switzerland)*, 15(14), 11316. <https://doi.org/10.3390/su151411316>
- Kamalu, K., & Wan Ibrahim, W. H. B. (2023). the Effect of Islamic Financial Development and Human Development on Income Inequality: Does Islamic Finance Kuznets Curve Valid in the Oic Countries? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(4), 661–684. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i4.1903>
- Kamalu, K., & Wan Ibrahim, W. H. B. (2023). The Effect Of Islamic Financial Development And Human Development On Income Inequality: Does Islamic Finance Kuznets Curve Valid In The Oic Countries? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(4), 661–684. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i4.1903>
- Korle, K., Amoah, A., Hughes, G., Pomeyie, P., & Ahiabor, G. (2020). Investigating the Role of Disaggregated *Economic freedom* Measures and FDI on Human Development in Africa. *Jeas*, 36(4), 303–321. <https://doi.org/10.1108/jeas-02-2019-0017>
- Kuandyk, Z. B., Assilova, A. S., & Kar, M. (2022). Analysis of Approaches and Methods of Assessing Human Capital in the Economy. *Economy: strategy and practice*, 17(1), 110–126. <https://doi.org/10.51176/1997-9967-2022-1-110-126>
- Linhartová, V., & Židová, E. (2016). The impact of corruption on economic growth in oecd countries. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 23(37), 83–94. <https://doi.org/10.5539/ijef.v8n9p91>
- Mawardi, I., & Risyad, M. H. (2025). Investigating the role of education, technology and Islamic finance in addressing economic inequality. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0374>
- Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Widiastuti, T., & Ghozali, M. (2024). The influence of institutional quality, *economic freedom*, and technological development on Islamic financial development in OIC countries. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2), 100279. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100279>
- Medias, F., Rahman, A. A., Susanto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2021). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 177–193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>
- Mth, A. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mawarid*, 10, 128–151. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art9>
- Mubarrok, U. S., Ulfi, I., & Izzulhaq, M. A. (2022). What Is Islamic Economics? An Attempt to Classify the Definitions of Islamic Economics. *Perisai Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 146–156. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1616>
- Mustafa, D. A., Abdulsalam, H. A., & Yusuf, J. B. (2016). Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah. *SAGE Open*, 6(4). <https://doi.org/10.1177/2158244016671374>
- Nasreen, S., Anwar, S., & Waqar, M. Q. (2015). Institutions, investment and economic growth: A cross-country and panel data study. *Singapore Economic Review*, 60(4). <https://doi.org/10.1142/S0217590815500617>
- Norhana Abdullah, N. S. B., Mastor, K. A., Razaleigh Muhamat, K., & Awang, A. (2023). Development Of Human Capital Through The Islamic Education Of Our Brothers

- (Mu'alaf) In Terengganu. *Afkar*, 25(1), 159–198.
<https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no1.6>
- Opadeji, A. S., Olaniyi, O. A., Adekanmbi, A. M., & Olubitan, J. O. (2023). Gross capital formation, Infrastructure and Economic Development in Nigeria. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23(22), 275–285.
<https://doi.org/10.9734/ajeaba/2023/v23i221152>
- Puspitasari, R. D., Nur, I., & Ilmas, D. N. A. N. (2023). Business Resilience and Creative Economy Post COVID-19. *European Journal of Business and Management Research*, 8(4), 267–275. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.4.2032>
- Putikhin, Y. E., Frolova, V. A., Shamina, L. K., & Volkova, L. V. (2017). The ways of effective interaction between the university and the enterprise in terms of advanced training programs. In *2016 IEEE 5th Forum Strategic Partnership of Universities and Enterprises of Hi-Tech Branches, Science. Education. Innovations 2016* (pp. 74–75). St. Petersburg Branch of Federal State Budget Institution of Higher Education, Financial University under the Government of the Russian Federation, Russian Federation: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
<https://doi.org/10.1109/IVForum.2016.7835859>
- Rakhimzhanova, G., Shayakhmetova, L., Tolepov, A., Maidyrova, A., & Tadjieva, S. (2024). Economic Assessment of the Quality of Human Capital. *Montenegrin Journal of Economics*, 20(4), 225–238. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2024.20-4.19>
- Rifin, M. K. I., Abd Latib, N. A., Mohammed Noor, A., & Mohd Taib, M. S. Bin. (2022). Past and Current Practices of Waqf of Health in Malaysia's Higher Education Institutions (HEI). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/15429>
- Risyad, M. H., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2025). Innovation for prosperity: analyzing the interplay of Islamic finance and *human capital* on economic development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0225>
- Sadr, S. K. (2015). The role of human capital in economic development of the earliest Islamic period. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 398–417. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0122>
- Saeed, K. A. (2021). Revisiting the natural resource curse: A cross-country growth study. *Cogent Economics and Finance*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2000555>
- SESRIC. (2016). OIC ECONOMIC OUTLOOK 2016.
- Shivkumar, S., Gupta, D., & Deepika, M. G. (2023). An Empirical Analysis of Relationship between Economic Growth and Freedom: A Cross Country Study using Machine Learning Approach. 2023 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, ICCCNT 2023, 1–7.
<https://doi.org/10.1109/ICCCNT56998.2023.10306837>
- Singh, D., & Gál, Z. (2020). *Economic freedom* and Its Impact on Foreign Direct Investment: Global Overview. *Review of Economic Perspectives*, 20(1), 73–90.
<https://doi.org/10.2478/revecp-2020-0004>
- Slesman, L., Baharumshah, A. Z., & Ra'ees, W. (2015). Institutional infrastructure and economic growth in member countries of the Organization of Islamic Cooperation

- (OIC). *Economic Modelling*, 51, 214–226.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.08.008>
- Sukmana, R., Fadhlillah, H., Ryandono, M. N. H., & Herianingrum, S. (2020). Protection of natural resources in sustainable economic development. *Test Engineering and Management*, 83(3544), 3544–3549.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082885773&partnerID=40&md5=d6fe73cdd49f117f91dff8e660521656>
- Susanto, A. A. (2024). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis (2020). *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 36–59.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3418>
- Waluyo, A. (2021). Islamization in the Discourse of Islamic Economics Integration. *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies*, 6(2), 80–89.
<https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v6i2.2811>
- Zafar, M. B. (2024). Human capital and financial performance of Islamic banks: a meta-analysis. *Accounting Research Journal*, 37(2), 230–248.
<https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2023-0257>
- Zafar, M. B., & Jafar, A. (2024). Human capital and Islamic banking: a systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0376>
- Zainur, Z. (2021). Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia's Economic Development. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 52–63. <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.170>
- Zakik, Z., Kamil, A., Prasetyo, A. S., Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2022). Economic development on Madura Island through halal tourism: A business feasibility study. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 289–303.
<https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p289-303>